

Kebijakan publik

Robert Eyestone

- Kebijakan publik didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
- Pengertian ini sangat luas dan kurang pasti karena menjadikan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal

Thomas R. Dye

- Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan
- Batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan
- Konsep ini bisa juga mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan PNS atau memberi lisensi, tindakan yang berada di luar domain kebijakan publik

Carl Friderich

- Kebijakan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan konsekuensi–konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.
- Definisi ini bersifat ambigu, namun kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan melakukan sesuatu.

Richard Rose

- Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Definisi dari Rihard ini sangat luas, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh kelompok dan individu. Gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud dilihat sebagai bagian dari definisi kebijakan publik yang penting

Pendefinisian Kebijakan Publik harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu

James Anderson

- Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
- Konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan dari berbagai alternatif.

Amir Santoso

Mengkomparasikan berbagai definisi dari para ahli

1. Ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.

2. Ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan, terbagi dalam 2 kubu:
pertama, yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan menganggap kebijakan publik sebagai memiliki dampak yang dapat diprediksikan. Para ahli melihat kebijakan publik dalam tiga area, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
kedua, melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.
Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diprediksikan.

- ▶ Kebijakan Publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah perlu untuk diperhatikan, untuk membedakan kebijakan publik dengan bentuk kebijakan-kebijakan lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta.
- ▶ Kebijakan oleh pihak swasta dipengaruhi oleh aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan.

Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan publik menjadi ciri khusus dari kebijakan publik.

Kenyataan kebijakan publik diformulasikan oleh “penguasa” dalam sistem politik

(David Easton)

Implikasi Konsep kebijakan Publik

1. Kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik

Implikasi Konsep kebijakan Publik

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan tidak hanya mencakup keputusan menetapkan undang-undang tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.

Implikasi Konsep kebijakan Publik

3. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah bukan apa yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik dalam bentuknya mungkin positif atau negatif.

- ▶ Positif: kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu.
- ▶ Negatif: kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus.

- ▶ Dalam bentuk yang positif: kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. Anggota-anggota masyarakat menerima secara sah bahwa pajak harus dibayar dan undang-undang perkawinan harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini beresiko denda, hukuman kurungan atau sanksi lainnya. Kebijakan publik mempunyai sifat ‘paksaan’. Sifat ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta.

Sifat kebijakan Publik sebagai arah tindakan, dirinci dalam beberapa kategori;

- ▶ *Policy demand* / tuntutan–tuntutan kebijakan
- ▶ *Policy decision* / keputusan–keputusan kebijakan
- ▶ *Policy statement* / pernyataan–pernyataan kebijakan
- ▶ *Policy outputs* / hasil–hasil kebijakan
- ▶ *Outcomes* / dampak–dampak kebijakan

Policy demand

- ▶ Tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.
- ▶ Tuntutan berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu
- ▶ Tuntutan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

Policy decision

- ▶ Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.
- ▶ Termasuk alam hal ini adalah kegiatan menetapkan undang-undang, memberikan perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

Policy statement

- ▶ Pernyataan–pernyataan resmi atau artikulasi–artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang–undang legislatif, peraturan–peraturan administratif dan pengadilan maupun pernyataan–pernyataan atau pidato–pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan–tujuan tersebut.

Policy outputs

- ▶ Manifestasi nyata dari kebijakan–kebijakan publik, hal–hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan–keputusan dan pernyataan–pernyataan kebijakan. Seperti: pembayaran pajak, pembangunan jalan raya, praktek pendidikan.
- ▶ Penyelidikan terhadap hasil–hasil kebijakan akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataannya agak atau sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan–pernyataan kebijakan.

Outcomes

- ▶ Hasil–hasil kebijakan berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak–dampak kebijakan (outcomes) lebih merujuk pada akibat–akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan.